

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Melalui pembahasan di atas disimpulkan:

1. Upah Minimum berpengaruh negatif serta signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari 2010 hingga 2022. Menunjukkan karena upah minimum adalah komponen penting dari kemiskinan dan jika upah minimum mengalami kenaikan, maka keluarga miskin mengalami penurunan, dan sebaliknya penurunan upah minimum akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 hingga 2022. Ini karena kemiskinan tidak terlihat hanya dari pendapatan tetapi juga dari akumulasi aset, sehingga orang yang menganggur tidak termasuk dalam masyarakat miskin.
3. *Dependency Ratio* tidak ada pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari 2010 hingga 2022. Dikarenakan *dependency ratio* lebih tinggi daripada usia sekolah atau usia non produktif di bawah 15 tahun, Sehingga kepala keluarga menanggung biaya sekolah, Akibatnya lebih banyak pendapatan dihabiskan untuk konsumsi daripada untuk nabung, yang berarti penurunan pembentukan modal serta penurunan pertumbuhan ekonomi.
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak ada pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari 2010 hingga 2022. Hal ini disebabkan

apabila tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi kemiskinan. Ini karena pendapatan didistribusikan secara tidak merata yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi.

## 5.2 Saran

Pertimbangan saran dipergunakan guna menarik kesimpulan:

1. Pembaca dapat mempelajari lebih lanjut mengenai kemiskinan di Jawa Timur serta faktor yang mempengaruhinya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan meneliti daerah yang lebih spesifik saja, khususnya perlu memperbarui periode penelitian dan lebih obyektif dengan memvariasikan atau menambah variabel independen.
2. Diharapkan bahwa pemerintah dapat membuat rencana pembangunan yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi, seperti meningkatkan kebijakan pelatihan bagi pengembangan UMKM, investasi, dan penggunaan produk dalam negeri.
3. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat meningkatkan standar sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam skala global. Hal ini bertujuan agar angka kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.